



---

## Pengaruh Penggunaan Aplikasi SIMADE, Terhadap Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tegal

Erny Rosyanti<sup>1</sup>, Tri Ardiansyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal  
Jalan Halmahera No 1 Kecamatan Tegal Timur  
Kota Tegal, 52121  
Koresponden Email : [Erosyanti@gmail.com](mailto:Erosyanti@gmail.com)

---

### Information Article

History Article

Submission : 28-Agustus-2019

Revision : 19-September-2019

Published : 29-Oktober-2019

---

### ABSTRAK

Berdasarkan instruksi Presiden RI No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui elektronik government itu sendiri lantas penerapan tersebut di tuangkan dalam penelitian karena peneliti menemukan fenomena dalam kenyataan bahwa kualitas pelayanan saat ini belumlah optimal dan belum terlaksana sesuai dengan instruksi Presiden RI “Apakah ada Pengaruh Penggunaan Aplikasi SiMaDe Terhadap Efektifitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tegal ?” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif asosiatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, angket dan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat Pengaruh yang nyata dan signifikan antara Penggunaan Aplikasi SIMADE Terhadap Efektifitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tegal yaitu sebesar 1%.

**Keyword:** Penggunaan Aplikasi Simade, Efektivitas Pelayanan

---



## **1. INTRODUCTION**

Dalam era globalisasi ini penyelenggaraan lembaga - lembaga pendidikan di Negara manapun di dunia di pandang sebagai suatu program yang sangat strategis. Hal ini berdasarkan satu asumsi bahwa proses pendidikan merupakan sebuah proses yang dengan sengaja dilaksanakan semata - mata bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, melalui proses pendidikan akan terbentuk sosok - sosok individu sebagai sumber daya manusia yang akan berperan besar dalam proses pembangunan bangsa dan Negara dan mampu bersaing secara global.

Dengan modal suatu pendidikan yang tinggi dengan didasari dengan semakin berkembangnya keilmuan di bidang teknologi maka Pemerintah dapat mewujudkan suatu Pemerintahan yang baik dengan kualitas pekerja yang terjamin juga. Untuk itu dalam suatu Pemerintahan penguasaan teknologi dan modernisasi dengan di landasi keilmuan yang tinggi sangat menunjang terwujudnya Pemerintahan yang sesuai dengan undang - undang dan harapan Pemerintah selama ini.

Dengan memiliki kemampuan serta jabatan yang dimiliki sesuai dengan kompetensi keilmuan yang di kuasai para sektor Pelayanan Publik akan memberikan suatu Pelayanan yang memuaskan. Karena sesuai dengan kompetensi keilmuan dan penguasaan teknologi mengikuti arus modernisasi yang memuaskan akan menjadikan juga sektor Publik melayani dengan profesi yang mereka perolehnya. Dan akan memberikan kesan yang baik sesuai dengan etika dalam menjalankan suatu Pelayanan Publik. Yang paling penting dalam menjalankan suatu Pelayanan dalam Pemerintahan adalah etika dimana

seseorang akan berhadapan langsung dengan masyarakat.

Sebagaimana dikutip dalam Moenir, A.S (2008: 186), unsur-unsur pelayanan publik tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena keempatnya akan membentuk proses kegiatan (activity). Keempat unsur tersebut yakni:

### **1. Tugas layanan**

Dalam pelayanan umum pemerintah harus memberikan pelayanan sesuai dengan tugas yang diterima untuk melayani semua kepentingan masyarakat.

### **2. Sistem atau prosedur layanan**

Yaitu dalam pelayanan umum perlu adanya sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.

### **3. Kegiatan pelayanan**

Dalam pelayanan umum kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat harus bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan tanpa adanya diskriminasi.

### **4. Pelaksana pelayanan**

Pemerintah sebagai pelaksana pelayanan semaksimal mungkin mengatur dan merencanakan program secara matang agar proses pelayanan akan menghasilkan struktur pelayanan yang mudah, cepat, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami masyarakat.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliable, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

### **1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan**

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tanggungjawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap

besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, dalam tataran realitasnya masih jauh dari harapan. Masih sering kita mendengar keluhan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik itu pada tingkat pemerintah pusat maupun pada pemerintah desa yang notabenehnya adalah pemerintah yang langsung merasakan interaksi dengan masyarakat, di tambah lagi dengan perilaku para oknum aparat birokrat yang tidak mencerminkan sebagai “ abdi dari masyarakat “, seperti lambat, berbelit – belit, tidak adil ( pilih kasih ) dan lain sebagainya, oleh karena itu kita perlu mereformasi birokrasi agar kita dapat mewujudkan pemerintahan yang baik ( good governance ) tentunya reformasi tersebut dapat dilakukan dengan cara memperbaiki

penyelenggaraan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan prima dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, agar pemerintah tidak terus menerus memberikan pelayanan yang memprihatinkan kepada masyarakat.

Sudah sepatutnya pemerintah mereformasi paradigma pelayanan publik tersebut. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, tak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. Inilah yang akan menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik.

Sebagai contoh terkecil pemerintahan salah satunya layanan publik pihak kelurahan atau desa. Di situ kita bisa melihat betapa buruknya sebuah kinerja layanan yang jauh dari harapan. Mereka memandang sebuah jabatan ataupun bagian kerja adalah sebuah rutinitas, melayani kebutuhan masyarakat tanpa adanya profesionalisme ataupun service yang baik, bahkan jauh dari harapan masyarakat sebagai customer mereka.

Kita dapat merasakan mulai dari jam kerja yang molor, bahkan setiap hari pasti ada yang tidak masuk karena alasan yang tidak jelas hingga tata cara kerja yang seolah-olah tidak adanya target dan administrative yang tidak baik menjadikan semua permasalahan harus ditanggung oleh masyarakat yang mau tidak mau harus menyerah kepada mereka. Kita dapat melihat betapa santainya pegawai kelurahan

dan buruknya dalam pelayanan, misalnya dalam pembuatan KTP.

Betapa kecewanya kita disaat hendak mengurus sebuah KTP harus bersusah payah untuk mendapatkannya. Berbagai alasan terlontar disaat kita akan mendapatkannya, mulai dari antrian, blanko yang kosong, pejabat kelurahan yang belum hadir, dan lain-lain tanpa adanya kejelasan yang pasti. Padahal kita sudah meluangkan waktu dan memenuhi segala persyaratan. Namun yang terjadi adalah kekecewaan yang seolah-olah harus kita tanggung sebagai harga mahal membuat KTP.

Sungguh ironis disaat kita harus mendapatkan hak sebagai warga negara namun tidak ada pelayanan yang baik bagi kita, padahal kita sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Mulai dari membayar pajak, mentaati peraturan pemerintah hingga berbelanja apapun sudah dikenakan pungutan atau pajak. Dari sini jelas tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Seharusnya pemerintah sudah sadar sepenuhnya arti pelayanan bagi masyarakat, mulai dari hal-hal yang kecil hingga besar dimana sudah seharusnya mereka berorientasi pada the real service.( pelayanan yang sesungguhnya ). (Elisabeth Sutriningsih/mar).

Pada saat ini persoalan yang dihadapi begitu mendesak, masyarakat mulai tidak sabar atau mulai cemas dengan mutu pelayanan aparatur pemerintahan yang pada umumnya semakin merosot atau memburuk. Pelayanan publik oleh pemerintah lebih buruk dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta, masyarakat mulai mempertanyakan apakah pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan

dan atau memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.

Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e-Government*. Keberadaan kebijakan penerapan *e-Government* merupakan salah satu infrastruktur penting dalam pemerintahan. Kebijakan penerapan *e-Government* telah menjadi kebutuhan sekaligus tuntutan publik yang menginginkan informasi secara akurat, transparan serta *accountable*.

Di Indonesia inisiatif kearah *e-Government* telah diperkenalkan sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian keluarnya Instruksi Presiden RI NO. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui *electronic government* itu sendiri. (Siti Mutia Nurcahyani Liputo. (2015). Penerapan *E-Government* Kelurahan Di Kantor Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukkang Kota Makassar).

Dari Uraian di atas untuk menuju pemerintahan yang *good government* dan berbasis IT yang berguna untuk meningkatkan mutu pelayanan di pemerintahan kabupaten tegal maka pemerintah Kabupaten Tegal melakukan sebuah terobosan baru dalam menuju pemerintahan daerah yang madani dan responsive dalam melaksanakan pelayanan

public baik di tingkat daerah maupun di tingkat desa sekalipun, dalam upaya mewujudkan usaha tersebut, pemerintah kabupaten tegal telah meluncurkan sebuah program aplikasi yaitu program SIMADE (Sistem Informasi Manajemen Desa) yang saat ini baru di aplikasikan 4 Desa di kabupaten Tegal, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan public yang ada di pemerintahan desa, agar pelayanan yang berkaitan dengan administrasi di desa menjadi semakin cepat akurat dan efektif sesuai dengan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang - Undang No. 6/2014 (UU tentang Desa).

SimaDe adalah salah satu bentuk reformasi birokrasi dari bentuk nyata *E-Government*, SIMADE lahir dari kepedulian dan keprihatinan melihat kenyataan yang ada di kantor desa/kelurahan. Sebuah fakta yang sudah seharusnya segera dicarikan jalan keluarnya. Sebuah fakta ketika harus mengurus surat-surat di kantor desa. Layanan perangkat desa dirasa terlalu lama. Mulai dari mencari data diri pemohon surat sampai dengan mengetik satu persatu data diri yang harus dimasukkan ke blangko surat. Semua begitu lama dan tidak efektif. Dari kejadian sederhana inilah kemudian lahir apa yang akan kita kenal dengan nama SimaDe (Sistem Informasi Manajemen Desa).

Sebuah program aplikasi yang dirancang, diobservasi dan diwujudkan dalam kurun waktu yang tidak singkat. Program aplikasi yang khusus dirancang untuk diaplikasikan di pemeritahan desa/kelurahan, yang mana pemeritahan desa merupakan ujung tombak dari pemerintahan secara nasional. Program ini juga didesign sesederhana mungkin tetapi mampu memberikan kemanfaatan yang

tinggi. Sederhana karena design interfacenya yang mudah dipahami/dijalankan oleh operator komputer yang belum mahir sekalipun. Akan tetapi program ini terbukti mampu menjawab persoalan administrasi desa yang cukup kompleks. SimaDe bekerja dengan cara mengolah database kependudukan menjadi lebih dari 35 kebutuhan administrasi desa/kelurahan Dengan SimaDe maka semua pekerjaan layanan surat-surat kepada masyarakat, termasuk laporan ke pihak kecamatan bahkan sampai keperluan penyusunan daftar hak pilih pemilu semua bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat dengan hasil yang akurat.

Masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi seperti surat pengantar atau surat keterangan lahir atau berkas lain dari pemerintah desa/kelurahan cukup dengan waktu dua menit. “Ya, hanya dua menit sekarang sudah terlayani cepat, tepat dan bisa memanfaatkan waktu yang sempit. (SUARA MERDEKA CyberNews – Jum’at, 18 Februari 2011).

Pelayanan desa 5 menit, itulah mimpi bagi kita semua. Hal itulah yang sedang berusaha diwujudkan di Kabupaten Tegal. Salah satunya dengan program SIMADE (Sistem Informasi Manajemen Desa) yang saat ini gencar dilakukan pelatihan oleh Dishubkominfo Kabupaten Tegal baru-baru ini. Hari ini (23/10) bertempat di Laboratorium Kominfo, Komplek Setda Kab Tegal. Jl Dr Soetomo No 1 Slawi. Kali ini acara bekerjasama antara Dishubkominfo, Telkom Slawi, dan SLKT.([www.InfoTegal.com](http://www.InfoTegal.com) | 23 October 2014)

Harapan dari berlangsungnya bintek ini adalah pelayanan publik ditingkat desa menjadi semakin cepat dan akurat didukung oleh perangkat teknologi informasi. Menurut Kepala Bidang TI dan Postel Dinas

Hubkominfo Kabupaten Tegal, Drs Saeful Mizan bahwa bintek ini merupakan program lanjutan yang sebelumnya telah diselenggarakan beberapa waktu lalu. “Bintek ini diikuti oleh perangkat desa dari sepuluh kecamatan secara bertahap, di mana satu hari diikuti oleh perangkat desa dari dua kecamatan”, kata Saeful. Mizan.

(<http://www.dishub.tegalkab.go.id>).

Berharap nantinya untuk pelayanan Ktp dan berkas lainnya yang bersifat umum dapat dilakukan di desa dengan mudah dan cepat, jadi selain menghemat waktu juga pelayanan lain dapat terselesaikan, dengan hanya 5 menit pengajuan pelayanan selesai. dan berharap nantinya anggota SLKT (sisi lain kabupaten Tegal) dapat berperan untuk mendampingi pelaksanaan SIMADE (sistem informasi manajemen desa) di desa. ([www.facebook.com/grup\\_SLKT](http://www.facebook.com/grup_SLKT))

Saat ini sudah ada aplikasi SIMADE yang bisa membantu pelayanan administrasi desa lebih cepat dan akurat, SIMADE adalah Sistem Informasi Manajemen Desa sebuah sistem aplikasi untuk desa yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja bagi perangkat desa, dengan SIMADE pengelolaan data kependudukan dapat berjalan dengan sangat cepat, akurat dan terintegrasi, dengan menggunakan SIMADE diharapkan pelayanan bagi warga dapat terwujud dengan baik dan surat menyurat bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat.

SimaDe juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang memungkinkan penyajian informasi profil desa dengan sangat cepat dan akurat. Bahkan sampai fitur untuk menghitung rekapitulasi uang pungutan harian berdasarkan jumlah surat yang dikeluarkan oleh desa. Ini sangat membantu untuk kepentingan monitoring, terhadap jalannya pemerintahan desa. Dalam perjalanannya Program SimaDe telah

banyak mengalami penyempurnaan, sehingga diharapkan Program SimaDe ini benar-benar menjawab kebutuhan pemerintah desa/ kelurahan. Kami juga menyadari bahwa program ini tidak berarti banyak tanpa peran serta perangkat desa/kelurahan yang mengoperasikannya.

Dengan SimaDe maka semua pekerjaan layanan surat-surat kepada masyarakat, termasuk laporan ke pihak kecamatan bahkan sampai keperluan penyusunan daftar hak pilih pemilu semua bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat dengan hasil yang akurat. SimaDe juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang memungkinkan penyajian informasi profil desa dengan sangat cepat dan akurat. Bahkan sampai fitur untuk menghitung rekapitulasi uang pungutan harian berdasarkan jumlah surat yang dikeluarkan oleh desa. Ini sangat membantu untuk kepentingan monitoring, terhadap jalannya pemerintahan desa.

Pada akhirnya , ketika Program aplikasi SimaDe ini benar-benar sudah digunakan, maka pihak yang secara langsung dapat menikmati kemudahannya adalah masyarakat dan perangkat desa/kelurahan itu sendiri. Masyarakat tidak lagi harus membuang waktu terlalu lama untuk mengurus surat-surat di kantor desa, yang petani segera bisa kembali bertani, yang pedagang juga segera bisa kembali berdagang, yang ibu rumah tangga segera bisa pulang menyelesaikan pekerjaan rumahnya, dan begitu seterusnya. Sementara perangkat desa bisa punya waktu lebih banyak untuk berinteraksi dengan warganya, dan pada gilirannya ini akan meningkatkan kualitas hubungan sosial kemasyarakatan antara pejabat pemerintah desa dengan rakyatnya.

Simade mempunyai peran strategis dalam era teknologi informasi , menghadapi situasi global dimana tuntutan masyarakat semakin kompleks, kesibukan semakin menumpuk, maka efisiensi waktu dan efektifitas kerja menjadi sesuatu yang sangat mendesak. Orang tidak lagi bisa seenaknya menggunakan waktunya. Semua menuntut pekerjaan apapun bisa dilakukan dengan cepat dan akurat. Dalam hal inilah Program Simade bisa mengambil peran yang cukup strategis. Program SimaDe sangat mengerti dengan tuntutan jaman. Pada saatnya nanti kantor desa / kelurahan tidak lagi dipenuhi dengan dokumen-dokumen yang memenuhi rak atau almari buku. Karena semua dokumen bisa disimpan dalam bentuk file digital. Itu artinya disamping tidak lagi diperlukan almari buku untuk menyimpan dokumen, pencarian dokumen akan sangat mudah dilakukan dengan format SimaDe.

Hanya dengan satu keping CD atau Flash Disk mungkin akan setara dengan dokumen satu almari. Semua menjadi mudah dan sederhana. Bahkan pada saatnya nanti sudah dibangun system online antara desa dengan kecamatan atau kabupaten, maka pertukaran data, kegiatan mutasi dapat langsung dilaporkan atau dipantau oleh instansi di atasnya. Sebuah era dimana jarak dan waktu tidak lagi menjadi kendala. Dalam situasi inilah SimaDe mempunyai peran yang strategis dalam rangka menyongsong kemajuan teknologi.

## **2. METODE**

Menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Administrasi (2013 :11- 12) mengatakan bahwa penelitian dapat dilihat dari tingkat eksplanasi yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan

variable – variable yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Berdasarkan hal ini penelitian dapat dikelompokkan menjadi:

a. Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

b. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Di sini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

c. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian asosiatif maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode asosiatif dimaksudkan guna mencari pengaruh penggunaan aplikasi SiMaDe terhadap efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal.

Menurut Prof. Dr. Suharsini Arikunto (1973:2013) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Kemudian Sugiyono (2009:80) berpendapat bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian populasi, dimana peneliti menggunakan semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian dengan populasi seluruh aparatur di desa yang mengaplikasikan aplikasi simade di kabupaten tegal dengan jumlah responden berjumlah 20 orang dan menggunakan teknik accidental sampling untuk menentukan jumlah sampel masyarakat yang akan di jadikan responden, teknik ini dipilih dikarenakan peneliti menjumpai orang tersebut dan kebetulan orang tadi ada di situ sedang mengajukan pelayanan di desa dengan jumlah sampel yang dipilih sebanyak 20 orang responden dari masyarakat, dalam hal ini peneliti memiliki jumlah responden sebanyak 40 responden dengan rincian 20 responden dari aparatur dan 20 responden dari masyarakat.

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Proses analisa data yang dilaksanakan dalam penelitian adalah dengan :

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber antara lain dari kuisioner (angket), dokumen/arsip, dan observasi.
- b. Mengadakan reduksi data dengan membuat rangkuman inti atas generalisasi dari data primer yang diperoleh dan dipadukan dengan data sekunder.

Analisis hubungan variabel penelitian ini digunakan analisa korelasi rank spearman digunakan untuk menguji

hubungan atau pengaruh variabel bebas (X) yaitu penggunaan aplikasi SiMaDe dan variabel terikat (Y) yaitu pelayanan administrasi kependudukan dengan rumus sebagai berikut (Sugiono 2004:212).

### 3. FINDINGS AND DISCUSSION

#### Sumberdaya Manusia

Indikator Sumber Daya Manusia (SDM) menggambarkan tentang kualitas SDM yang dimiliki aparatur / operator aplikasi dalam menguasai penggunaan aplikasi SiMaDe diukur melalui pernyataan dibawah ini ;

Tabel 1

Distribusi frekuensi pertanyaan penguasaan fungsi fitur-fitur

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Sangat Menguasai	-	-
2.	Menguasai	8	40 %
3.	Cukup	7	35 %
4.	Kurang Menguasai	4	20 %
5.	Tidak Menguasai	1	5 %
	Jumlah	20	100 %

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 20 Orang, (40%) aparatur di keempat desa yang menggunakan aplikasi SIMADE memilih jawaban menguasai berjumlah 8 orang, 7 orang (35%) di keempat desa yang menggunakan aplikasi SIMADE memilih jawaban cukup, 4 orang (20%) di keempat desa yang menggunakan aplikasi SIMADE memilih jawaban kurang menguasai, 1 orang (5%) di keempat desa yang menggunakan aplikasi SIMADE memilih jawaban Tidak menguasai. Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan rata – rata aparatur yang menguasai penggunaan aplikasi SIMADE berjumlah 8 orang dengan jumlah presentase sebesar 40%.

#### Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana menggambarkan tentang alat bantu dan alat penunjang kesuksesan atau keberhasilan dalam kesuksesan penggunaan aplikasi SIMADE terhadap pelayanan Dengan items pernyataan dibawah ini ;

Tabel 2

Distribusi frekuensi pertanyaan tentang Kesesuaian spesifikasi computer yang tersedia

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Sangat Sesuai	4	-
2.	Sesuai	11	20 %
3.	Sedang – Sedang Saja	2	55 %
4.	Kurang Sesuai	3	10 %
5.	Tidak Sesuai	-	15 %
	Jumlah	20	100 %

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 4 Orang (20%) aparatur desa yang menjawab sangat sesuai, 11 orang (55%) aparatur menjawab sesuai, 2 orang (10%) aparatur menjawab sedang-sedang saja, 3 orang (15%) aparatur menjawab kurang sesuai. . Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan rata – rata aparatur desa yang mengoprasionalkan aplikasi SIMADE menjawab bahwa ketersediaan sarana dan prasarana komputer yang tersedia di kantor kepala desa sudah sesuai dengan spesifikasi yang di butuhkan system untuk mengoperasionalkan aplikasi SiMaDe sudah sesuai dengan jumlah aparatur 11 orang dan presentasenya (55%).

#### Validitas Database

Menunjukkan tingkat kevalidan data/ keakuratan data yang ditawarkan dan kemudahan kearsipan yang dimiliki oleh aplikasi simade dalam keberlangsungan pelayanan yang di berikan oleh masyarakat. Dengan pertanyaan dibawah ini ;

Tabel 3

Distribusi frekuensi pertanyaan tentang tingkat validitas data yang ditawarkan aplikasi

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Sangat Valid	-	-
2.	Valid	10	50 %
3.	Cukup	5	25 %
4.	Kurang Valid	3	15 %
5.	Tidak Valid	1	5 %
	Jumlah	20	100 %

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 10 Orang (50%) aparaturnya menjawab valid, 5 orang (25%) aparaturnya menjawab cukup, 3 orang (15%) aparaturnya menjawab kurang valid, dan 1 orang (5%) aparaturnya menjawab tidak valid. Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan rata-rata aparaturnya yang mengoperasikan aplikasi SIMADE menjawab bahwa Bagaimana tingkat validitas data kependudukan yang tersedia di dalam system database aplikasi SiMaDe menjawab valid dengan jumlah penjawab 10 orang dan persentasenya 50%.

### Rekapitulasi Jawaban Responden "Pengguna Aplikasi Simade"

Hasil perolehan data dari 10 jawaban items pertanyaan terhadap 20 responden aparaturnya yang menjadi operator di keempat desa yang menggunakan aplikasi SiMaDe, kemudian direkapitulasi untuk menguji variabel "Penggunaan Aplikasi SiMaDe".

Dengan cara mencari total score  $\sum X_1 + \sum X_2 + \dots + \sum X_{10}$ , jadi  $(\sum X) = 62 + 65 + \dots + 72 = 724$  Nilai maksimum (max) untuk variabel Penggunaan Aplikasi SiMaDe ( $\sum X$ ) diperoleh melalui = jumlah items pernyataan dikalikan nilai tertinggi dikalikan jumlah responden aparaturnya sebanyak 20 responden dari total 40 responden keseluruhan, jadi diperoleh  $10 \times 5 \times 20 = 1000$ , sedangkan nilai minimum (min) untuk variabel Penggunaan Aplikasi SiMaDe ( $\sum X$ ) diperoleh melalui = jumlah items pernyataan dikalikan nilai

terendah dikalikan jumlah responden, jadi diperoleh  $10 \times 1 \times 20 = 200$ .

Range merupakan jumlah nilai maksimum (max) dikurangi nilai minimum =  $1000 - 200 = 800$ , selanjutnya dengan mengetahui range nilai dari jawaban responden maka dapat ditentukan Rentang Skala (RS) pengukuran yaitu range dibagi skala pengukuran =  $800 / 5 = 160$ , Rentang Skala (RS) digunakan untuk menentukan rentang penilaian dalam kategori "penggunaan aplikasi" yang ditentukan dalam standar derajat penilaian berikut:

Tabel 4

Rentang Skala Variabel "Penggunaan Aplikasi"

Rentang Skala (RS)	Kriteria
840 - 1000	Sangat Baik
680 - 840	Baik
520 - 679	Sedang
360 - 519	Buruk
200 - 359	Sangat Buruk

Total skor perolehan data terhadap variabel "Penggunaan Aplikasi SiMaDe" ( $\sum X$ ) yaitu 1576. Dengan menggunakan rentang penilaian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai variabel "Penggunaan Aplikasi SiMaDe" berada pada kategori "Baik".

### Kualitas Pelayanan

Menggambarkan tentang seperti apa kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparaturnya kepada masyarakat selaku pengguna pelayanan di desa, hal tersebut diukur melalui pernyataan, antara lain yaitu :

Tabel 5

Distribusi frekuensi pertanyaan tentang tingkat prosedur pelayanan

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Sangat Mudah	4	20 %
2.	Mudah	14	70 %
3.	Tidak Tahu	2	10 %
4.	Cenderung Sulit	-	-
5.	Sangat Sulit	-	-
	Jumlah	20	100 %

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 4 Orang (20%) masyarakat selaku pengguna pelayanan memilih jawaban sangat mudah, 14 orang (70%) masyarakat memilih jawaban mudah, 2 orang menjawab tidak tahu (10%) sedangkan jawaban cenderung sulit dan sangat sulit tidak dipilih oleh responden. Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan rata-rata masyarakat desa selaku pengguna pelayanan menjawab bahwa tingkat prosedur pelayanan yang di berikan kepada masyarakat itu mudah dengan jumlah orang yang menjawab sebanyak 14 orang presentase sebesar 70%.

### Kuantitas Pelayanan

Kuantitas Pelayanan menggambarkan tentang jumlah Pelayanan yang dapat diberikan oleh aparatur terhadap masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan dengan items pernyataan dibawah ini:

Tabel 6

Distribusi frekuensi pertanyaan tentang kesesuaian jam kerja aparatur

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Sangat Sesuai	5	25 %
2.	Sesuai	11	55 %
3.	Ragu - Ragu	4	20 %
4.	Kurang Sesuai	-	-
5.	Tidak Sesuai	-	-
	Jumlah	20	100 %

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 5 Orang (25%) %) masyarakat desa selaku pengguna pelayanann memilih jawaban sangat sesuai, 11 orang (55%) masyarakat memilih jawaban sesuai, 4 orang (20%) masyarakat memilih jawabn ragu - ragu, jawabankurang sesuai, dan tidak sesuai tidak dipilih oleh responden. Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan masyarakat desa selaku pengguna

pelayanann selalu menjawab bahwa aparatur di desa datang dan pulang kerja sesuai dengan waktu yang telah di tentukan oleh instansi dengan jawaban responden sebanyak 11 orang dengan jumlah presentase sebesar 55%.

### Kepuasan Pelayanan

Kepuasan Pelayana menggambarkan tentang sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur, dengan items pernyataan yaitu:

Tabel 7.

Distribusi Frekuensi pertanyaan tentang kesesuaian jam kerja aparatur

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Sangat Cepat	2	10%
2.	Cepat	15	75%
3.	Sedang - Sedang Saja	3	15%
4.	Lambat	-	-
5.	Sangat Lambat	-	-
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 3 Orang (15%) masyarakat desa selaku pengguna pelayanann memilih jawaban sangat cepat, 15 orang (75%) masyarakat memilih jawaban cepat, 2 orang (10%) jawaban sedang - sedang saja ,sedangkan jawaban lambat dan sangat lambat tidak dipilih oleh responden. Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan rata - rata masyarakat desa selaku pengguna pelayanan menjawab bahwa pengajuan pelayanan yang dapat di selesaikan menggunakan aplikasi SiMaDe berlangsung cepat, dengan jumlah jawaban responden sebanyak 15 orang dan presentase sebesar 75%.

### Rekapitulasi Jawaban Responden "Efektivitas Pelayanan"

Hasil perolehan data dari 10 jawaban items pernyataan terhadap 20 masyarakat selaku pengguna pelayanan di keempat desa di atas, kemudian direkapitulasi untuk menguji variabel “Efektifitas Pelayanan”.

Dengan cara mencari  $\sum Y_1 + \sum Y_2 + \dots + \sum Y_{10}$ , jadi  $(\sum Y) = 82 + 81 + \dots + 77 = 754$ . Nilai maksimum (max) untuk variabel Efektifitas Pelayanan ( $\sum Y$ ) diperoleh melalui = jumlah items pernyataan dikalikan nilai tertinggi dikalikan jumlah responden masyarakat yang berjumlah 20 orang dari total keseluruhan jumlah responden sebanyak 40, jadi diperoleh  $10 \times 5 \times 20 = 1000$ , sedangkan nilai minimum (min) untuk variabel Efektifitas Pelayanan ( $\sum Y$ ) diperoleh melalui = jumlah items pernyataan dikalikan nilai terendah dikalikan jumlah reponden, jadi diperoleh  $10 \times 1 \times 20 = 200$ .

Range merupakan jumlah nilai maksimum (max) dikurangi nilai minimum =  $1000 - 200 = 800$ , selanjutnya dengan mengetahui range nilai dari jawaban responden maka dapat ditentukan Rentang Skala (RS) pengukuran yaitu range dibagi skala pengukuran =  $800/5 = 160$ . Rentang Skala (RS) digunakan untuk menentukan rentang penilaian dalam kategori “Efektifitas Pelayanan” yang ditentukan dalam standar derajat penilaian berikut:

Tabel 7

Rentang Skala Variabel “Efektifitas Pelayanan”

Rentang Skala (RS)	Kriteria
840 - 1000	Sangat Baik
680 - 840	Baik
520 - 679	Sedang
360 - 519	Buruk
200 - 359	Sangat Buruk

Total skor perolehan data terhadap variabel “Efektifitas Pelayanan” ( $\sum Y$ ) yaitu 754. Dengan menggunakan rentang penilaian di atas, maka dapat ditarik

kesimpulan mengenai variabel “Efektifitas Pelayanan” berada pada kategori “Baik”.

### Analisis Data

Sebelum menentukan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, maka perlu menganalisis terlebih dahulu pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan menggunakan rumus korelasi Rank Spearman, sebagai berikut :

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum bi^2}{n(n^2-1)}$$

Keterangan :

- $\rho$  = korelasi rank spearman
- $\sum bi^2$  = jumlah hasil analisa
- n = jumlah responden

Dari perolehan skor angket variabel X dan variabel Y kemudian dimasukkan ke dalam tabel sebagai persiapan perhitungan analisis korelasi Rank Spearman.

Diketahui tabel penolong korelasi rank spearman  $\sum di^2$  adalah 1192,25 maka perhitungan korelasi rank spearman adalah :

$$rs = 1 - \frac{6 \cdot \sum d1^2}{n(n^2 - 1)}$$

$$rs = 1 - \frac{6 \cdot \sum d1^2}{n(n^2 - 1)}$$

$$rs = 1 - \frac{6 \cdot 1192,25}{20(20^2 - 1)}$$

$$rs = 1 - \frac{7153,5}{7980}$$

$$rs = 1 - 0,896$$

$$rs = 0,104$$

Sebagai interpretasi, angka ini perlu di bandingkan dengan tabel nilai-nilai  $\rho$  (dibaca: rho) dalam Tabel IV.24. dari tabel

itu terlihat bahwa untuk  $n=20$ , dengan derajat kesalahan 5% di peroleh harga 0,450 dan untuk 1% di peroleh harga 0,591. Hasil  $\rho$  hitung ternyata lebih besar dari  $\rho$  tabel.

Derajat kesalahan 5% :  $0,104 < 0,450$  berarti  $\rho$  hitung  $<$  dari  $\rho$  tabel

Derajat kesalahan 1% :  $0,104 < 0,519$  berarti  $\rho$  hitung  $<$  dari  $\rho$  tabel

Berdasarkan hasil penghitungan menggunakan penghitungan rank speraman di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh penggunaan aplikasi simade terhadap efektifitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal. Dengan demikian hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) di tolak. Atau dengan kata lain bahwa variabel penggunaan aplikasi SIMADE tidak berpengaruh terhadap efektifitas pelayanan administrasi kependudukan. Dibuktikan dengan hasil bahwa  $\rho$  hitung ternyata lebih kecil dari  $\rho$  table yaitu :

Derajat kesalahan 5% :  $0,104 < 0,450$  berarti  $\rho$  hitung  $<$  dari  $\rho$  tabel

Derajat kesalahan 1% :  $0,104 < 0,519$  berarti  $\rho$  hitung  $<$  dari  $\rho$  table.

#### 4. KESIMPULAN

- 1) Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa penggunaan aplikasi SIMADE (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DESA) tergolong baik. Di buktikan dengan nilai skor variabel X (penggunaan aplikasi SIMADE) yaitu sebesar 724 dengan menggunakan rentang skala, skor tersebut berada pada kategori baik.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian di ketahui juga bahwa efektifitas pelayanan administrasi kependudukan tergolong

baik, dibuktikan dengan nilai skor variabel Y (efektifitas pelayanan) yaitu sebesar 754 dengan menggunakan rentang skala, skor tersebut berada pada kategori baik.

- 3) Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak adanya pengaruh penggunaan aplikasi SIMADE terhadap efektifitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal, hal ini di akibatkan adanya factor seperti tingkat SDM operator yang kurang dan adanya ketidak sesuaian data sehingga pelayanan yang seharusnya dapat di lakukan dengan aplikasi, harus dilakukan dengan pelayanan manual.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Pangestu, D.W. (2007). *Teori Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Ilmu Komputer.com
- Raymon Mc.Leod. Jr. (1995). *Sistem informasi manajemen*, ed I. Jakarta: Prenhallindo
- Mu'alimah / D03205017 / Kependidikan Islam (Manajemen Pendidikan) *Peran Sistem Informasi Manajemen Dalam Peningkatan Layanan Pendidikan Di SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT – RSBI Jombang*.
- Gordon B. Davis. (1984). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajmemen*, Bag II, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo
- Margianti,E.S. Suryadi, H.S. *Sistem Informasi Manajemen*. Penerbit Gunadarma.
- Arifin, Johan & Ahmad Fauzi, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*,Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Wijaya, Amin Tunggal, 1993. *Manajemen suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta Jaya, Jakarta.
- Sarwoto 1990, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Moenir, 2005, *Manajmen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara.

Singarimbun, Masri Effendi, Sofian, 1985,  
*Metode Penelitian*, Jakarta : LP3ES.

Sugiyono, 2004, *Metodologi Penelitian  
Administrasi*, Cakra Buana : Jakarta.

Sugiyono, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*,  
Bandung :Alfabeta.